

## Implementasi Kebijakan Open Government Data (OGD) dalam Menyongsong Smart City di Kota Surabaya: Studi pada PPID Kota Surabaya

Muhammad Sultan Wachid<sup>1</sup>, Amanda Nathaniela<sup>2</sup>, Annisaa Shalsabila Miracle<sup>3</sup>,  
Anggeli Susi Rose Ardian<sup>4</sup>, Muhammad Hidayatullah<sup>5</sup>, Muhammad Agus Muljanto<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
sultanpsap21@gmail.com<sup>1</sup>, amandanathaniela@gmail.com<sup>2</sup>,  
miracle.shalsabila@gmail.com<sup>3</sup>, anggelisusi1920@gmail.com<sup>4</sup>,  
mhidayatullah908@gmail.com<sup>5</sup>, magusmuljanto@upnjatim.ac.id<sup>6</sup>

### ABSTRACT

Rapid urban population growth brings various challenges, such as decreasing quality of public services, reduced residential space, congestion, and increasing crime. Smart City is here as a solution to overcome this challenge and create a city that is safe and comfortable for its residents. Transparency of government data through Open Government Data (OGD) is the key to realizing a Smart City. This research aims to test the implementation of OGD in the City of Surabaya in realizing a Smart City. It is hoped that the research results can provide solutions for relevant agencies and the Indonesian Government in the field of OGD and Smart City. This research applies a descriptive qualitative approach, which adopts an inductive data analysis process to build understanding from specific to general aspects. This approach involves collecting data through in-depth interviews, literature reviews involving previous research published in accredited journals and mass media, as well as utilizing relevant documentation. In this research, it was found that the implementation of smart city in the city of Surabaya can be analyzed through the theory of policy implementation by George C. Edwards III, with aspects of the importance of communication, resources, implementor disposition, and bureaucratic structure. In managing open data, the City of Surabaya has an Information and Documentation Management Officer (PPID) who is responsible for carrying out public information services which include activities for storing, documenting, providing and disseminating information to the public. One of the obstacles to the implementation of open data is that people do not understand the urgency of open government data, so that public intervention and voice of support is also limited. Apart from that, coordination of each unit in each agency that takes part in implementing open government data must also be integrated.

**Keywords:** Open Government Data, Urban Development, Smart city.

### ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat membawa berbagai tantangan, seperti menurunnya kualitas layanan publik, berkurangnya ruang hunian, kemacetan, dan meningkatnya kriminalitas. Smart City hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya. Transparansi data pemerintah melalui Open Government Data (OGD) menjadi kunci dalam mewujudkan Smart City. Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi OGD di Kota Surabaya dalam mewujudkan Smart City. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi bagi instansi terkait dan Pemerintah Indonesia dalam bidang OGD dan Smart City. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif pendekatan kualitatif, yang mengadopsi proses analisis data induktif untuk membangun pemahaman dari aspek yang spesifik hingga umum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah pustaka melibatkan penelitian-penelitian terdahulu yang terpublikasi dalam jurnal terakreditasi dan media massa, serta pemanfaatan dokumentasi yang relevan. Pada penelitian ini di dapati bahwa implementasi smart city di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, dengan aspek pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dalam

pengelolaan open data Kota Surabaya memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam menjalankan layanan informasi publik yang mencakup aktivitas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta penyebaran informasi kepada publik. Adapun salah satu penghambat dari implementasi open data yaitu masyarakat yang kurang memahami urgensi open government data, sehingga campur tangan dan suara dukungan publik juga terbatas. Selain itu, koordinasi masing-masing unit di setiap instansi yang turut andil dalam implementasi open government data juga harus terintegrasi.

**Kata kunci :** *Open Government Data, Pembangunan Kota, Smart city.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan telah menimbulkan tantangan, seperti penurunan mutu layanan publik, berkurangnya ruang hunian, kemacetan parah di jalan, kesulitan mencari tempat parkir, peningkatan konsumsi energi, penumpukan sampah, dan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan bahwa masalah-masalah ini akan semakin melonjak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di masa mendatang. Untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan visi kota yang aman serta nyaman bagi penduduknya, dibutuhkan solusi yang cerdas dan tegas. Hal ini perlu dilakukan dengan cepat, melampaui lajunya pertumbuhan masalah. Cara efektifnya adalah melalui implementasi dan sinergi dengan ekosistem kota, yang tercakup dalam konsep smart city (Ardinata, et al., 2022).

Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Schaffers, 2011). Dalam konsep solusi smart city ini, instansi pemerintah, dunia industri, para akademisi, maupun masyarakat mesti ikut terlibat dalam menjadikan kota agar menjadi lebih baik. Kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government, sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Kebijakan ini sifatnya praktis, dimana di dalam isinya telah memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing dalam melaksanakan pengembangan e government secara nasional yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional.

Transparansi menjadi penting karena berkaitan dengan hubungan kepercayaan timbal balik oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat melalui penyediaan informasi dan pelayanan publik. Sehingga masyarakat mampu mengakses dan memperoleh informasi yang disediakan oleh pemerintah dengan akurat dan valid. Transparansi Data Pemerintah dibentuk berdasarkan arus informasi yang semakin berkembang dari hari ke hari. Segala aktivitas Lembaga pemerintahan hendaknya dipublikasikan sehingga masyarakat pun berhak mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan, maka berdampak pula pada intensitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konsep utama dari Data Terbuka adalah ketersediaan dan keterbukaan akses, penggunaan ulang dan pendistribusian ulang serta keikutsertaan universal. Sedangkan untuk konsep open government sendiri terinspirasi pada saat administrasi pemerintahan Obama di tahun 2009, dimana selanjutnya hampir seluruh dunia mulai menyusun strategi untuk juga menerapkannya pada pemerintahan mereka. Khusus untuk data terbuka pemerintah, penting untuk diperhatikan bahwa data yang wajib dibuka adalah yang bersifat Informasi Publik. Kriteria Informasi Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada pasal 17 disebutkan mengenai penyebaran informasi yang dikecualikan (informasi non-publik). Oleh karena terdapat program Nawa Cita yang kini menjadi dasar dari visi-misi pemerintahan Indonesia untuk menjadi pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, maka muncullah komitmen Open Government Indonesia (OGI) (Sulaiman, et al., 2021).

Surabaya sebagai kota berkembang menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan konsep Smart City. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan mobilitas tinggi menimbulkan kemacetan lalu lintas yang sulit diatasi. Kualitas layanan publik mengalami penurunan karena meningkatnya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tata kelola ruang kota menjadi kritis dengan berkurangnya lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum. Selain itu, konsumsi energi yang tinggi dan masalah keamanan serta kriminalitas juga menjadi fokus perhatian.

Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan open government data muncul sebagai solusi potensial. Dengan memanfaatkan data terbuka, Surabaya dapat mengatasi masalah kepadatan penduduk dan mobilitas tinggi melalui analisis data mobilitas untuk pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien. Transparansi informasi melalui open government data juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan pemantauan kinerja berbasis data.

Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan data terbuka untuk pengembangan infrastruktur yang efektif. Selain itu, identifikasi pola konsumsi energi dan analisis kriminalitas melalui data terbuka dapat membantu pengembangan kebijakan yang lebih cerdas dan responsif. Dengan demikian, open government data menjadi kunci dalam merespons dan merancang solusi untuk mewujudkan Smart City di Surabaya.

Penerapan open data government di Kota Surabaya perlu didorong untuk dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan proses perencanaan pembangunan seharusnya melibatkan banyak aktor khususnya masyarakat dengan aktor pemerintah menjadi utama. Penerapan open data government mampu menghasilkan transparansi publik dan meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, masyarakat juga dapat secara aktif memantau kemajuan proyek pembangunan yang berlangsung, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas dipertimbangkan secara tepat. Dalam hal ini jurnal terdahulu yang kami pakai adalah jurnal dengan judul "SMART GOVERNMENT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG" oleh (Santoso & Rahmadanita 2020). menjelaskan tentang analisis implementasi smart government di Kota Bandung serta menjadi salah satu wujud dukungan bagi smart city.

Melalui jurnal ini dapat diketahui bahwa Smart city di Kota Bandung tidak luput dari aspek infrastruktur, didapati kendala seperti fiber optik yang masih kurang, belum tersedia pemetaan infrastruktur Pemkot Bandung dalam mengimplementasikan smart government. Yang kedua adalah jurnal yang berjudul "ANALYSIS STUDY OF OPEN DATA IMPLEMENTATION TO IMPROVE PUBLIC POLICY MAKING PROCESS IN JAKARTA PROVINCIAL GOVERNMENT BASED Abstract ON DYNAMIC GOVERNANCE" oleh (Wiyani, Wijaya, & Nawir 2019) memaparkan bahwa open data merupakan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemerintah supaya terwujud transparansi, akuntabilitas, campur tangan masyarakat yang kemudian akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Jakarta sendiri telah menerapkan konsep ini melalui Portal Data Jakarta, namun kolaborasi antara Bappeda dan Diskominfo dinilai masih belum berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang kurang, selain itu open data di Jakarta belum memiliki arah yang spesifik meskipun open data di Jakarta telah dimuat dalam RPJMD.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian kami adalah menguji implementasi open government data di kota surabaya untuk mewujudkan smart city kota surabaya yang sesuai dengan teori Edward III. Hasil penelitian dapat memberikan solusi bagi instansi yang terkait dan Pemerintah Indonesia umumnya pada bidang yang sesuai dengan subtema Open Governance Data. Lalu manfaat dari penelitian ini kami bagi menjadi 2 yakni aspek teoritis dan aspek praktis. Berdasarkan aspek teoritisnya yakni diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai open government data dan konsep penerapan open governance yang data telah dilakukan oleh pemerintah kota surabaya dan perlu ditingkatkan lagi dalam mewujudkan smart city di kota surabaya. Lalu berdasarkan aspek praktisnya yakni diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah dalam meningkatkan urgensi open government data untuk mewujudkan smart city di kota surabaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif pendekatan kualitatif, yang mengadopsi proses analisis data induktif untuk membangun pemahaman dari aspek yang spesifik hingga umum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah pustaka melibatkan penelitian-penelitian terdahulu yang terpublikasi dalam jurnal terakreditasi dan media massa, serta pemanfaatan dokumentasi yang relevan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, dengan memilih narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidangnya. Para informan ini berasal dari pejabat di Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga dapat memberikan wawasan yang substansial terkait dengan isu yang diteliti. Adapun data yang digunakan merupakan data terbaru yaitu tahun 2024.

Dalam tahap pengolahan data, peneliti menggunakan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dan memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang ada dalam studi kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk merinci dan

memahami lebih dalam aspek-aspek khusus yang muncul dari wawancara, sambil tetap mengaitkannya dengan temuan yang telah tercatat dalam literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Pengertian Open Government Data (OGD)

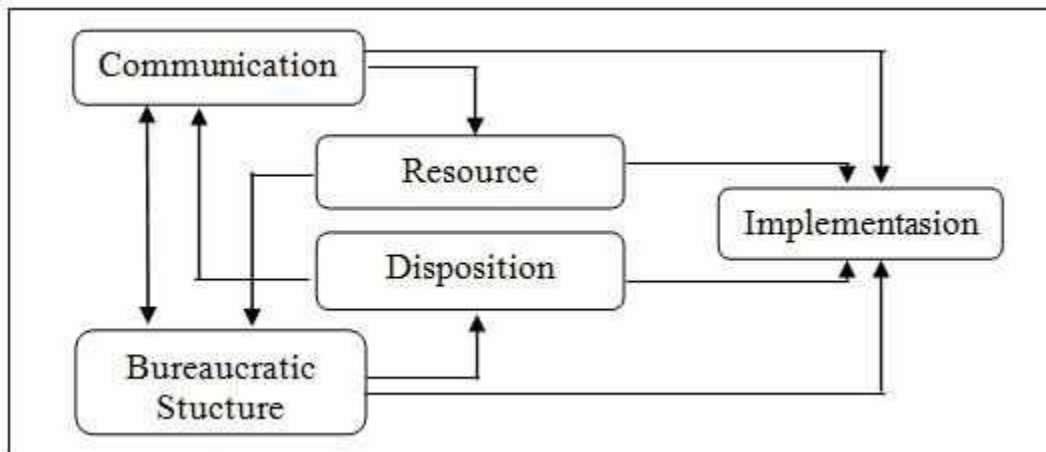
Inisiatif Open Government Data (OGD) telah diusulkan dan dilaksanakan oleh banyak pemerintahan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan dan fungsi sektor publik, partisipasi publik dan kolaborasi antara publik, swasta, dan sipil organisasi, dan penciptaan pengetahuan, layanan, dan bisnis yang inovatif. Menurut Fadlan & Obert (2019) salah satu upaya dalam mendorong transparansi pemerintah serta partisipasi masyarakat adalah dengan melalui OGD. Open Government Data merupakan bagian dari Open Data yang secara sederhana dapat diartikan sebagai data pemerintah yang dibuat untuk umum dan terbuka. Open government data (OGD) mengacu pada pembuatan informasi untuk sektor publik yang tersedia secara bebas dalam format terbuka dan cara cara yang memungkinkan akses oleh publik . Ketersediaan open data telah tumbuh secara signifikan, dengan tekanan yang ditempatkan pada semua jenis organisasi publik untuk merilis data mentah yang dimiliki pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barati (2023) yang berpendapat bahwa data pemerintah memenuhi syarat sebagai OGD jika data tersedia, dapat diakses, dapat digunakan kembali, dan dapat didistribusikan kembali. Ini berarti bahwa data yang dirilis harus tersedia dengan mudah dan gratis bagi siapa saja, dalam jumlah besar format yang dapat diproses dengan baik, dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang mengizinkan penggunaan kembali dan pendistribusian ulang, di termasuk menggabungkan dengan dataset lain. Sedangkan menurut Retnowati, et al (2018) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari OGD yakni :

1. Data yang tersedia harus lengkap. Maksudnya adalah semua data publik tersedia. Data publik adalah data yang tidak tunduk pada privasi yang valid, keamanan atau batasan hak istimewa.
2. Sumber data harus primer Maksudnya adalah data harus dikumpulkan di sumbernya, dengan tingkat perincian tertinggi, tidak dalam agregat atau formulir yang dimodifikasi.
3. Tepat waktu. Maksudnya adalah data tersedia secepat yang diperlukan untuk mempertahankan nilai data.
4. Dapat diakses. Maksudnya adalah data tersedia untuk rentang pengguna terluas untuk berbagai macam tujuan.
5. Data dapat diproses oleh mesin platform apapun. Maksudnya adalah data harus cukup terstruktur untuk memungkinkan pemrosesan otomatis.
6. Non-diskriminatif. Maksudnya adalah data tersedia untuk siapa saja, tanpa persyaratan pendaftaran.
7. Non-kepemilikan. Maksudnya adalah data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
8. Bebas lisensi. Maksudnya adalah data tidak tunduk pada hak cipta, paten, merek

dagang atau peraturan rahasia perdagangan. Dengan privasi yang masuk akal, keamanan, dan batasan hak istimewa dapat diizinkan.

## b) Implementasi OGD Berdasarkan Teori George C. Edward III



Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Sumber: Widodo, Joko, 2011

Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam Nainggolan, R. (2017), terdapat 4 faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud. Keempat faktor ini harus ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan dan hasil wawancara kami yang dikaitkan dengan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III :

### 1. Komunikasi (Communication)

Menurut Edwards III (1980:17), ada beberapa variabel dalam komunikasi. Pertama, untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif, para pelaksana kebijakan harus mengetahui tugas mereka dengan jelas. Keputusan atau kebijakan harus disampaikan (ditransmisikan) kepada personel yang tepat sebelum bisa dilaksanakan. Hal ini tentu memerlukan komunikasi yang akurat dan harus dipahami dengan jelas oleh semua yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kedua, setelah transmisi informasi dilakukan, hal berikutnya yang harus diterapkan adalah memastikan petunjuk pelaksanaan diterima dengan jelas. Jika tidak, pelaksana kebijakan akan kebingungan mengenai tugas mereka dan mungkin menerapkan pandangan mereka sendiri, yang bisa berbeda dari arahan atasan. Ketiga, menurut Edwards III (1980:17), konsistensi kebijakan sangat penting. Kebijakan yang saling bertentangan dapat membingungkan pelaksana dan menghambat efektivitas penerapan kebijakan.

Implementasi smart city di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Surabaya, komunikasi yang jelas dan konsisten melalui sosialisasi langsung dan media center sangat penting untuk memastikan semua pemangku kepentingan memahami

tujuan dan cara kerja program smart city. Sumber daya yang mencukupi, termasuk teknologi dan anggaran, telah dialokasikan melalui berbagai program seperti e-project dan e-budgeting. Sikap positif dari implementator ditunjukkan oleh komitmen pemerintah kota dan penghargaan yang diterima, serta peningkatan mutu aparatur sipil negara. Struktur birokrasi yang efisien juga mendukung koordinasi antar dinas dalam implementasi berbagai aspek smart city. Pelaksanaan open data di Surabaya berjalan dengan cukup baik, menyediakan akses data pemerintah kepada publik melalui platform online. Namun, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat menghambat pemanfaatan optimal dari data tersebut. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, implementasi smart city di Surabaya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## 2. Sumber Daya (Resources)

Implementasi open data governance di Kota Surabaya, khususnya dalam sektor Diskominfo, dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menekankan pentingnya sumber daya sebagai salah satu faktor kunci. Menurut Edwards III, sumber daya mencakup tidak hanya staf yang kompeten dan terampil, tetapi juga informasi yang memadai dan wewenang yang jelas. Dalam konteks Diskominfo Kota Surabaya, sumber daya yang ada telah terbukti cukup memadai untuk mendukung open data governance. Staf yang bertugas telah melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan wewenang yang diberikan, memastikan bahwa data yang dibuka untuk publik dikelola dengan baik dan tersedia untuk diakses.

Hal ini sejalan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik bila ada sumber daya yang memadai, termasuk staf yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan staf yang kompeten dan sumber daya yang memadai, Diskominfo Surabaya mampu mendukung inisiatif open data governance. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan data yang tersedia. Meskipun data telah dibuka untuk publik, kurangnya sosialisasi menghambat pemanfaatan optimal dari data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar open data governance dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

## 3. Disposisi (Disposition)

Menurut teori implementasi Edwards III, faktor disposisi dalam Diskominfo Kota Surabaya telah terbukti menjadi variabel penting. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan pelaksana kebijakan terhadap suatu arah kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang diambil sebelumnya. Namun, jika sikap atau pandangan pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi menjadi lebih rumit. Dalam konteks ini, pengaturan birokrasi, termasuk penunjukan dan pengangkatan staf yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, menjadi penting. Insentif juga diusulkan sebagai salah satu teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana kebijakan, karena manusia cenderung bertindak atas

kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, memberikan insentif dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan di Diskominfo Kota Surabaya.

#### 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Menurut Edwards III (1980) struktur birokrasi merupakan suatu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Struktur birokrasi menitik beratkan pada peran struktur organisasi yang tidak berbelit. Henri menyampaikan pendapatnya bahwa, birokrasi merupakan sistem manajemen yang memiliki hierarki baik, yang menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengetahuan, koordinasi dan pengendalian. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi penting bagi setiap instansi agar dapat menjalankan fungsi dan produk kebijakan dengan optimal, tidak terkecuali dengan program open government government data. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan layanan informasi publik yang mencakup aktivitas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta penyebaran informasi kepada publik. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya PPID Kota Surabaya dibantu oleh PPID pembantu dan pejabat yang memiliki fungsi terkait. Berikut merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh PPID.



Sumber: website <https://ppid.surabaya.go.id/>

Tujuan dari struktur organisasi PPID adalah untuk memastikan efektivitas transfer informasi publik. Struktur organisasi ini merupakan beberapa komponen utama yang saling bekerja sama dalam tugas dan fungsi PPID.

- a. PPID Utama bertugas selaku pusat koordinasi dan pengendalian seluruh aktivitas pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. PPID Utama bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah serta memiliki fungsi utama dalam menjamin keterbukaan informasi dan layanan kepada publik.

- b. PPID Pembantu bertugas sebagai pembantu jalannya tupoksi PPID Utama, disetiap organisasi perangkat daerah terdapat PPID pembantu yang bertugas mengelola informasi publik di masing-masing organisasi perangkat daerah dan melaporkan serta menyampaikan informasi tersebut secara langsung kepada PPID Utama untuk disampaikan kepada public

## c) **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Open Government Data di Kota Surabaya**

### **Faktor Pendukung**

Pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen dalam memberi dukungan open government data, sebagai bagian dari usaha dalam memperbaiki birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh pihak seperti walikota, wakil walikota, dinas, hingga pihak ketiga secara terbuka dalam memberi inovasi melalui implementasi e- government dan open government data. Adapun maksud dari implementasi e-government dan open government data yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberi ruang bebas bagi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain dari masing-masing unit pemerintahan, Pemkot Surabaya berhasil menggandeng Universitas Airlangga untuk melakukan penelitian dan pengembangan open government data, kolaborasi antara pemkot dan komunitas *code for* Surabaya dalam aplikasi Surabaya Smart City, serta lembaga swadaya masyarakat *Transparency International Indonesia* yang terlibat dalam promosi urgensi transparansi dan akuntabilitas data publik.

### **Faktor penghambat**

Sejauh implementasi open government data di Surabaya, masih didapati Masyarakat yang kurang memahami urgensi open government data, sehingga campur tangan dan suara dukungan publik juga terbatas. Selain itu, koordinasi masing-masing unit di setiap instansi yang turut andil dalam implementasi open government data juga harus terintegrasi, pengolahan data dalam jumlah besar juga harus diperhatikan dengan baik agar informasi yang disampaikan pada publik dapat dipertanggungjawabkan, serta sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government, sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e- government. Kebijakan smart city selalu dikaitkan dengan open government yang memiliki konsep utama meliputi ketersediaan dan keterbukaan akses, penggunaan ulang dan pendistribusian ulang serta keikutsertaan universal.

Pada penelitian ini di dapati bahwa implementasi smart city di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, dengan aspek pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Surabaya, komunikasi dilakukan dengan jelas melibatkan

media dan langsung, disamping itu sumber daya juga mumpuni, tingginya komitmen dari Pemerintah Kota Surabaya, yang menyebabkan pelaksanaan open data di Surabaya berjalan dengan cukup baik. Dalam pengelolaan open data Kota Surabaya memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam menjalankan layanan informasi publik yang mencakup aktivitas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta penyebaran informasi kepada publik. Adapun salah satu penghambat dari implementasi open data yaitu masyarakat yang kurang memahami urgensi open government data, sehingga campur tangan dan suara dukungan publik juga terbatas. Selain itu, koordinasi masing-masing unit di setiap instansi yang turut andil dalam implementasi open government data juga harus terintegrasi

## DAFTAR PUSTAKA

### Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Ardinata, R. P., et al. (2022). Kepemimpinan transformasional sebagai solusi pengembangan konsep smart city menuju era society 5.0: sebuah kajian literatur [Transformational leadership as a solution for the development of the smart city concept in the society era: a literature review]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1), 33-44.
- Barati, M. (2023). Open Government Data Programs and Information Privacy Concerns: A Literature Review. *arXiv preprint arXiv:2312.10096*.
- Fadlan, M., & Obert, O. (2019). Pemanfaatan Open Government Data Dalam Meningkatkan Kewaspadaan Terhadap Kriminalitas. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 13(2), 105-110.
- Kota Surabaya, P. (2021). Laporan Layanan Informasi Publik. <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kota-surabaya-2013.pdf>
- Nainggolan, R. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sambul Kabupaten Dairi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rahmani, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 85-94.
- Retnowati, R., Manongga, D. H. F., & Sunarto, H. (2018). Penerapan dan perspektif open government data (ogd) di beberapa negara: pendekatan literatur.
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di kota bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(2), 317-334.
- Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112-130.
- Sulaiman, M., & Ilmiah, D. (2021). Transformasi Perpustakaan Khusus menjadi Data Labs dalam Mendukung Open Data dan Open Government di Indonesia. *Media Pustakawan*, 28(1), 1- 14.
- Wiyani, F., Wijaya, M. E., & Nawir, A. A. (2019). Analysis Study Of Open Data

# **VISA: Journal of Visions and Ideas**

Vol 4 No 3 (2024) 1498 - 1508 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.3119

Implementation To Improve Public Policy Making Process In Jakarta Provincial Government Based On Dynamic Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 93- 102.

## **Pustaka berbentuk buku:**

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis*. Malang.

## **Pustaka dari Media Online:**

Schaffers, Hans, E. al. (2011). *mart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation*. *Future Internet Assembly, LNCS 6656*.

Kota Surabaya, PPID. *Struktur Organisasi PPID*. Diakses Pada hari Kamis, pukul 14.30, Tanggal 9 Mei 2024. strukturOrganisasiPPID | PPID Surabaya